

Tujuan :  
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani  
IK: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja  
2.Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi

SS 1  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi  
Ik : 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

SS 2  
Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi  
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi

Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi  
IK : Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP

Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi  
IK : Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP

Meningkatnya pengawasan internal organisasi  
IK: Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP

Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan  
IK :  
Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan atau persentase keterisian peta jabatan

Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian  
IK: 1. Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP  
2. Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP  
3. Persentase Layanan Sapras sesuai SOP

Meningkatnya pengelolaan BMD  
IK: 1. Persentase BMD dalam kondisi baik  
2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sapras pendukung kinerja

Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi  
IK : Jumlah SDM yang mengikuti Pengembangan Kompetensi

Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu  
IK: Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun tepat waktu

Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah  
IK : Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan perangkat daerah

Meningkatnya Implementasi Dokumen Perangkat Daerah  
IK : Persentase kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Penganggaran

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Organisasi Tepat Waktu  
IK : Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yg disusun tepat waktu

Meningkatnya Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan  
IK : Persentase Dokumen Pelaporan yg sesuai dg pedoman penyusunan Laporan

Meningkatnya Pemanfaatan laporan terhadap perencanaan perangkat Daerah  
IK : Persentase Hasil evaluasi yg ditindaklanjuti dlm dokumen perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan  
IK: persentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan

Meningkatnya tindak lanjut temuan pemeriksaan  
IK: % temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu  
IK: Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/ LHKASN tepat waktu

Ketersediaan data kepegawaian yang akurat  
IK: Persentase ketersediaan data kepegawaian

Tersusunnya Uraian Tugas ASN sesuai regulasi  
IK : Dokumen Uraian tugas yg sesuai regulasi

Ketersediaan Dokumen Analisa Jabatan dan Peta Jabatan yg sesuai dg regulasi  
Ik : Dokumen Anjab yg sesuai dg regulasi  
2. Dokumen Peta Jabatan yg sesuai dg regulasi

Tersusunnya Dokumen SOP sesuai regulasi  
IK : Dokumen SOP yg sesuai regulasi

Meningkatnya Kapasitas SDM pemberi Layanan  
IK : Jlh SDM layanan yang kompeten

Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara  
IK : 1. Jumlah Aset yg diadakan  
2. Jumlah Aset yg dipelihara  
3. Persentase Aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan

Meningkatnya Pengamanan BMD sesuai regulasi  
IK : 1.Persentase Aset yg diinventaris  
2.Persentase Data Aset yang sudah di Rekon  
4.Persentase Aset yg sudah diarsipkan

Tersusunnya Data Kebutuhan pengembangan Kapasitas SDM  
IK : Dokumen Riwayat Pengembangan Kapasitas SDM yg tersusun

Tersusunnya Rencana Kebutuhan pengembangan Kapasitas SDM  
IK : Dokumen Rencana kebutuhan Pengembangan Kapasitas SDM yg tersusun

**Menurunnya Peraturan Perundang-undangan yang Tumpang Tindih dan Disharmonis**

IK : Persentase penurunan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis

**Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan**

IK : Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan

*Terwujudnya produk hukum daerah provinsi dan kab/kota yang difasilitasi*

IK : Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum

**Terwujudnya fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kab/kota**

IK : Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan dievaluasi

**Terwujudnya klarifikasi produk hukum daerah kab/kota**

IK: Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang diklarifikasi

**Terwujudnya fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi**

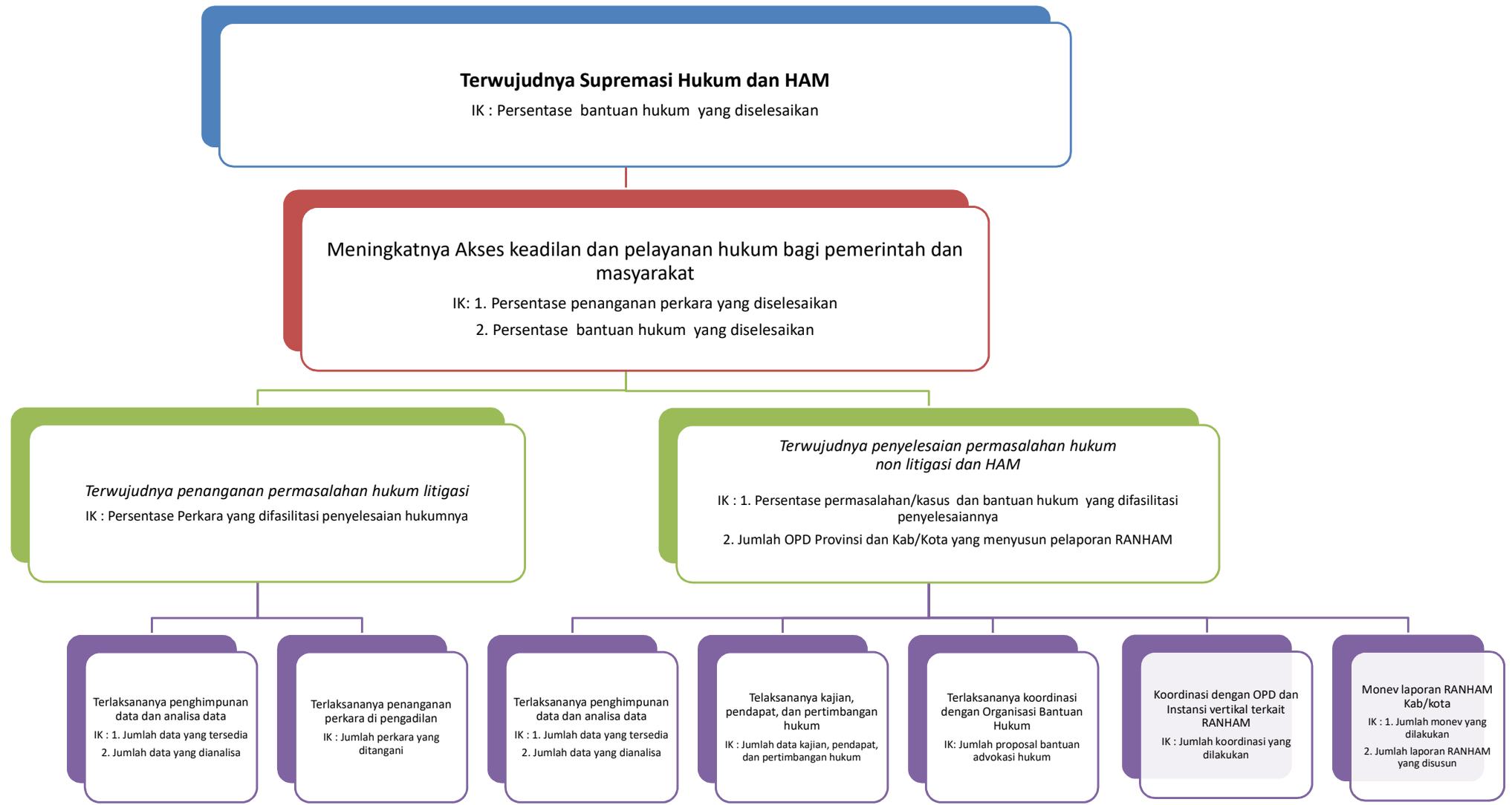
IK : Jumlah pembentukan produk hukum daerah provinsi yang diselesaikan

**Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah**

IK : 1. Jumlah produk hukum daerah yang dicabut karena tidak relevan lagi  
2. Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi secara berkala

**Tersedianya dokumentasi produk hukum daerah yang terintegrasi**

IK : 1. Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui situs JDIH  
2. Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan melalui buku



Padang, Maret 2022  
 KEPALA BIRO HUKUM  
 EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.  
 Pembina Utama Muda,  
 NIP. 197410311998031004